

The Role of the Village Government in the Development of Tlocor Marine Tourism in Kedungpandan Village

Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Wisata Bahari Tlocor di Desa Kedungpandan

Meylani Wulandari¹⁾, Hendra Sukmana.^{*2)}

¹⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia)

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: hendrasukmana@umsida.ac.id

Abstract *This research was motivated by Kedungpandan Village being one of the verified independent tourist villages. Apart from that, Kedungpandan Village also has extraordinary natural potential and needs tourism development. The aim of this research is to describe and analyze the role of the village government in developing Tlocor Marine Tourism in Kedungpandan Village. This research uses qualitative descriptive research methods by conducting interviews, observation and documentation. This research refers to the tourism development theory proposed by Pitana and Gayatri), which consists of three indicators, namely motivators, facilitators and dynamists. This research uses data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of this research are the role of the village government in developing Tlocor Marine Tourism in Kedungpandan Village, showing that: (1) the role of the village government as a motivator is in accordance with established theory and in accordance with reality during field observations. (2) the role of the village government as a facilitator is not in accordance with the established theory and in accordance with the reality during field observations, due to the minimal budget managed by the village government. Apart from that, the village government also does not have ownership documents for tourist attractions. (3) the role of the village government as a dynamist is not yet in accordance with established theory and in accordance with the reality at the time of field observations, because the village government has not been able to manage and develop the potential resources it has.*

Keywords - *the role of village government; tourism development.*

Abstrak. *Penelitian ini dilatar belakangi oleh Desa Kedungpandan menjadi salah satu desa wisata mandiri yang sudah terverifikasi. Selain itu, Desa Kedungpandan juga memiliki potensi alam yang luar biasa dan perlu pengembangan wisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah desa dalam pengembangan Wisata Bahari Tlocor di Desa Kedungpandan, Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini mengacu pada teori pengembangan pariwisata yang diajukan oleh Pitana dan Gayatri, yang terdiri dari tiga indikator, yaitu motivator, fasilitator, dan dinamisator. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah peran pemerintah desa dalam pengembangan Wisata Bahari Tlocor di Desa Kedungpandan menunjukkan bahwa: (1) peran pemerintah desa sebagai motivator, sudah sesuai dengan teori yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kenyataan pada saat observasi di lapangan. (2) peran pemerintah desa sebagai fasilitator, belum sesuai dengan teori yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kenyataan pada saat observasi di lapangan, karena minimnya anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa. Selain itu, pemerintah desa juga belum memiliki surat kepemilikan tempat wisata. (3) peran pemerintah desa sebagai dinamisator, belum sesuai dengan teori yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kenyataan pada saat observasi di lapangan, karena pemerintah desa belum dapat mengelola serta mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki.*

Kata Kunci – *peran pemerintah desa; pengembangan wisata.*

I. PENDAHULUAN

Desa Kedungpandan terletak di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo yang berjarak sekitar 20 km dari pusat Kota Sidoarjo. Desa Kedungpandan memiliki potensi pariwisata yang luar biasa karena letaknya yang strategis dan memiliki keindahan panorama alam yang unik. Potensi pariwisata tersebut telah diresmikan oleh pemerintah desa yakni, Wisata Bahari Tlocor pada tahun 2011. Pengakuan Desa Kedungpandan sebagai Desa Wisata Mandiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Memparekraf) serta verifikasi Wisata Bahari Tlocor di Pesona Indonesia sejak tahun 2022 dengan klasifikasi maju menandakan adanya perkembangan yang signifikan dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Wisata Bahari Tlocor, salah satu objek wisata yang terdapat di Desa Kedungpandan, telah terverifikasi sebagai destinasi wisata yang menarik di Indonesia. Verifikasi tersebut membuktikan bahwa Wisata Bahari Tlocor memiliki fasilitas yang memadai dan layanan yang berkualitas, menjadikannya sebagai tempat yang ideal untuk mobilisasi wisatawan yang ingin mengunjungi Pulau Lusi. Dengan verifikasi di tingkat nasional, menyatakan bahwa objek wisata ini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan

pemerintah. Wisata bahari ini memiliki akses menuju pulau tersebut melalui kapal penyeberangan yang dikelola oleh pokdarwis dibawah naungan Bumdes Mitra Abadi Kedungpandan. Sebagai Desa Wisata Mandiri, Desa Kedungpandan telah berhasil merencanakan dan mengelola pariwisata secara mandiri. Pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk mengembangkan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung pariwisata di daerah tersebut. Desa Wisata Mandiri Desa Kedungpandan dengan keberadaan Wisata Bahari Tlocor dan kapal penyeberangan sebagai sarana transportasi wisatawan menuju Pulau Lusi, dapat berkontribusi secara positif terhadap perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Wisatawan yang datang membawa pengaruh positif terhadap perekonomian desa dengan adanya peningkatan dalam penjualan produk lokal, jasa pelayanan, dan kegiatan pariwisata lainnya. Pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi kreatif lainnya. Keberhasilan Desa Kedungpandan sebagai Desa Wisata Mandiri menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah dalam memberikan dukungan dan pendampingan terhadap pengembangan pariwisata di daerah pedesaan. Sebagai desa wisata mandiri, Desa Kedungpandan juga harus mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan keberlanjutan tempat wisatanya. Pengelolaan yang baik dan berkelanjutan akan memastikan kelestarian alam di sekitar wisata. Hal ini akan menjadi daya tarik bagi wisatawan yang mengeksplor wisata alam dengan panorama yang unik. Dalam mengelola Wisata Bahari Tlocor, perlu juga diperhatikan aspek keselamatan dan keamanan wisatawan. Fasilitas dan infrastruktur yang memadai harus disediakan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan wisatawan selama berada di tempat wisata ini. Selain pengelolaan tempat wisata yang baik, promosi dan pemasaran juga menjadi hal yang penting. Desa Kedungpandan perlu memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mempromosikan Wisata Bahari Tlocor. Kerjasama dengan travel agen dan perusahaan tur juga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke tempat ini. Dalam era digital ini, potensi pariwisata harus dapat diakses dan ditampilkan dengan baik melalui platform online. Informasi mengenai Wisata Bahari Tlocor harus mudah ditemukan dan lengkap sehingga wisatawan dapat dengan mudah merencanakan perjalanan mereka.

Pengembangan Wisata Bahari Tlocor merupakan upaya pemerintah desa Kedungpandan yang didukung oleh Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang otonomi desa. Otonomi desa merupakan sebuah konsep dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang memberikan hak dan wewenang kepada desa dalam mengatur urusan pemerintahannya[1]. Dalam hal ini, desa Kedungpandan memiliki hak untuk mengelola potensi yang ada di wilayahnya, termasuk pengembangan wisata bahari Tlocor. Pada undang-undang tersebut terdapat pasal yang menyebutkan bahwa desa memiliki hak untuk mengelola potensi yang ada di wilayahnya dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa melihat potensi pengembangan wisata bahari Tlocor sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan desa dan kemakmuran masyarakat setempat. Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki peluang yang sangat besar baik bagi negara maupun masyarakatnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Pariwisata adalah suatu kegiatan yang dapat dilakukan oleh semua orang dengan memanfaatkan waktu luang untuk menikmati keindahan alam [2]. Oleh karena itu, pariwisata memiliki peluang yang sangat besar baik bagi negara dan Masyarakat. Desa Kedungpandan memiliki potensi untuk menjadi perekonomian desa yang mandiri, di mana desa tersebut dapat mengembangkan dan mengelola sumber daya yang ada tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah. Untuk mencapai hal ini, diperlukan kerjasama dan tekad yang kuat dari masyarakat dan pemerintahan desa dalam mengelola serta mengembangkan potensi yang dimiliki. Adapun regulasi pendukung Peraturan Daerah Jawa Timur No. 4 Tahun 2022 tentang pengembangan desa wisata menjadi landasan hukum penting dalam mengarahkan pengembangan Desa Kedungpandan sebagai destinasi wisata [3]. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan wisata. Dalam hal ini, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan dan regulasi yang mendukung pengembangan wisata, sedangkan masyarakat memiliki peran aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata. Dengan menjadi desa maju dan mandiri kesejahteraan dan perekonomian Masyarakat mengalami peningkatan, serta kualitas hidup Masyarakat menjadi lebih baik. Bukan hanya perekonomian Masyarakat yang meningkat, tetapi pendapatan asli desa juga mengalami peningkatan [4]. Dapat dilihat pada tabel 1.1 tentang rekapitulasi jumlah pengunjung Wisata Bahari Tlocor pada tahun 2021-2023 (bulan juni).

Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Wisatawan Bahari Tlocor pada tahun 2021-2023 (bulan juni)

TAHUN	JUMLAH
2021	90.504 orang
2022	88.199 Orang
2023-Juni	40.492 orang

Sumber: Diolah oleh Pemerintah Desa Kedungpandan, (2023)

Berdasarkan data yang diperoleh, kunjungan wisata ke Bahari Tlocor pada tahun 2021 mencapai 90.504 orang. Angka ini menunjukkan tingginya minat wisatawan untuk mengunjungi lokasi ini pada tahun tersebut. Namun, pada

tahun 2022 terjadi penurunan jumlah kunjungan sebesar 2% menjadi 88.199 orang. Penurunan ini menandakan adanya perubahan dalam minat wisatawan terhadap lokasi ini. Selanjutnya, diketahui bahwa kunjungan wisata ke Bahari Tlocor pada tahun 2023, terhitung dari bulan Januari hingga Juni, sebanyak 40.492 orang. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat penurunan jumlah kunjungan wisata pada tahun 2022, tetapi terjadi peningkatan jumlah kunjungan pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya potensi pengembangan wisata alam Bahari Tlocor dan perlu dilakukan evaluasi terhadap peran pemerintah desa dalam pengembangan tersebut.

Peran pemerintah desa dalam pengembangan Wisata Bahari Tlocor selama ini ialah melakukan penambahan sarana prasarana yaitu berupa perbaikan jalan dan penambahan jalan dengan melakukan pavingisasi di sekitar Wisata Bahari untuk memudahkan wisatawan dengan menggunakan anggaran APBDes. Selain itu pemerintah desa juga mendirikan Gedung Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yang mana BUMDES menjadi pilar penting bagi kegiatan ekonomi Masyarakat desa. Ketiga, pemerintah desa juga memberikan fasilitas berupa kios di bawah naungan BUMDES untuk Masyarakat sekitar, tujuan pemerintah desa memberikan kios tersebut ialah untuk memberikan wadah usaha bagi Masyarakat sekitar dan juga untuk mensejahterakan perekonomian Masyarakat. Saat ini, pemerintah desa juga mendorong Masyarakat untuk membuat cinderamata yang berciri khas Wisata Bahari Tlocor. Pemerintah desa juga memberikan peluang bagi mahasiswa dari berbagai Universitas untuk melakukan penelitian dan memberikan pelatihan pembuatan kerajinan tangan. Selain itu, pemerintah desa juga melakukan branding wisata dengan memberikan izin kepada para komunitas untuk mengadakan event di Wisata Bahari Tlocor dengan mendatangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kedinasan Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Adapun event yang diadakan komunitas seperti, pada tahun 2023 komunitas AX'S Blakrakan Jawa Timur atau komunitas otomotif dengan lingkup se-Provinsi melakukan pertemuan ajang silaturahmi di Bahari Tlocor. Selain itu, *rental car Indonesia* (RCI) mengadakan lomba mancing yang dihadiri oleh pejabat setempat, perwakilan dari dispora, serta wakil Bupati Sidoarjo. Di tahun yang sama satuan siswa pelajar mahasiswa pemuda Indonesia (Sapma PP) Sidoarjo dan Gerakan ekonomi kreatif nasional (Gekrafs) mengadakan pertemuan dengan skala nasional. Dengan adanya berbagai macam *event* tersebut pemerintah berharap Wisata Bahari Tlocor semakin dikenal banyak orang bukan hanya Masyarakat Sidoarjo tetapi juga dikenal oleh wisatawan asing dan wisatawan luar pulau.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susi Iswanti, Zulkarnaini (2022) dengan judul "Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teori pitana dan gayatri (2005) yang menyatakan bahwa ada 3 indikator dalam pengembangan pariwisata diantaranya motivasi, fasilitator, dan dinamisator. Pada penelitian ini, ditemukan bahwa peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata sudah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Salah satu masalah yang dihadapi dalam pengembangan wisata adalah kurangnya modal. Kurangnya modal membuat pemerintah desa harus mengandalkan sumber daya yang terbatas. Pendanaan yang kurang memadai dapat menghambat pengembangan destinasi wisata yang optimal dalam pengembangan wisata. Selain kurangnya modal, rendahnya SDM juga menjadi hambatan dalam pengembangan wisata di daerah tersebut. minimnya partisipasi masyarakat juga menjadi hambatan dalam pengembangan wisata di daerah tersebut. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat lokal, pemerintah desa akan mendapatkan dukungan dalam pengelolaan wisata dan pengembangan potensi wisata yang ada. Namun, dalam penelitian ini ditemukan bahwa partisipasi masyarakat masih minim. Masyarakat masih kurang memiliki kesadaran tentang pentingnya wisata dalam meningkatkan perekonomian lokal dan belum sepenuhnya terlibat dalam kegiatan pengembangan wisata. [1]

Kedua, dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Heny Ayu Agustina, Slamet Muchsin, Suyeno (2021) dengan judul "Tata Kelola Pengembangan Objek Wisata Bahari Tlocor dalam Menarik Wisatawan Domestik (Studi Kasus Wisata Bahari Tlocor Dusun Tlocor Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo)". Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan teori Cooper dkk dalam Sunaryo (2013:159) yang menegaskan bahwa dalam pengembangan destinasi wisata memiliki beberapa indikator seperti, Objek daya tarik bagi wisatawan, Aksesibilitas, amenities, sarana prasarana, dan Lembaga. Penelitian ini memiliki hasil yang menunjukkan bahwa (1) tata kelola dalam pengembangan wisata bahari Tlocor sudah baik. Salah satu indikator keberhasilan tata kelola tersebut adalah peningkatan jumlah pengunjung setiap tahun. panorama yang indah di Tlocor juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam pengembangan wisata bahari tersebut. Keindahan alam yang dimiliki oleh Tlocor membuat wisatawan tertarik untuk menjelajahi dan menikmati keindahan yang ada. (2) dalam proses pengembangan wisata tentunya ada beberapa faktor yang mendukung perkembangan Wisata Bahari Tlocor, seperti keindahan panorama alamnya dan juga ketersediaan infrastruktur yang memadai. Namun, terdapat juga faktor-faktor yang menghambat pengembangan Wisata Bahari Tlocor, di antaranya adalah keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang tersedia, serta kurang optimalnya upaya promosi [5].

Pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Ratna Medi (2018) yang berjudul "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Buntu Burake di Kabupaten Tana Toraja". Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif. Menurut Terry (2009) menyatakan bahwa pengelolaan ialah proses yang melalui beberapa

tahapan antara lain, perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil membangun beberapa infrastruktur pariwisata, seperti jalan, tempat parkir, dan sarana penunjang lainnya. Namun, peran pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur dan promosi pariwisata. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa masalah yang dihadapi dalam pengelolaan potensi pariwisata Buntu Burake. Masalah pertama adalah keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata. Meskipun pemerintah daerah telah mengadakan pelatihan dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, namun partisipasi mereka dalam pengelolaan pariwisata masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang manfaat pariwisata bagi ekonomi lokal. Masalah kedua yang dihadapi adalah pengelolaan kebersihan lingkungan di sekitar Buntu Burake. Penelitian ini menemukan bahwa limbah yang dihasilkan oleh wisatawan dan usaha pariwisata di daerah ini belum dikelola dengan baik [6].

Berdasarkan observasi di lapangan terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengembangan Wisata Bahari Tlocor di Desa Kedungpandan diantaranya pertama, Pemerintah desa sudah memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mengembangkan Wisata Bahari Tlocor. Pemerintah desa sudah memberikan motivasi tiada henti kepada pengelola maupun Masyarakat dengan berupa materiil maupun non materiil. Dukungan berupa materiil ialah pemerintah desa memberikan anggaran untuk pengelolaan Wisata Bahari Tlocor. Suatu objek wisata bahari seharusnya memiliki spot foto yang bisa dijadikan ikon wisata. Spot foto ini dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi objek wisata tersebut. Selain itu, seharusnya pemerintah juga menyediakan arena *outbond* bagi anak-anak karena dengan dibangunnya arena *outbound* Wisata Bahari Tlocor bisa menjadi sasaran sekolah untuk kegiatan *out bounding*. Kedua, Minimnya dana yang digunakan pemerintah desa dalam pengembangan pariwisata ini juga menjadi kendala yang paling penting. Di samping itu, pemerintah desa belum bisa mengelola penuh wilayah dermaga Bahari tlocor karena belum memiliki surat kepemilikan terkait objek wisata Bahari. Letaknya di sempadan Sungai dimana wilayah tersebut masih menjadi kewenangan dari Badan Wilayah Pengembangan Sungai (BPWS). Ketiga, Bahari Tlocor, sebagai salah satu objek wisata bahari yang potensial, seharusnya memiliki cinderamata yang berciri khas daerah tersebut. Cinderamata yang unik dan memiliki nilai ekonomi dapat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat setempat. Namun, pada kenyataannya, masyarakat di Bahari Tlocor belum mengasah kemampuan mereka untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Dalam upaya mengatasi hal ini, pemerintah desa telah memberikan bantuan kepada masyarakat dengan memberikan pelatihan terkait pembuatan cinderamata. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam menghasilkan cinderamata yang berkualitas. Selain itu, bantuan pemerintah desa juga dilakukan dalam bentuk bimbingan oleh mahasiswa yang sedang melakukan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul "Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Wisata Bahari Tlocor di Desa Kedungpandan". Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah "bagaimana peran pemerintah desa dalam pengembangan Wisata Bahari Tlocor di Desa Kedungpandan?" Adapun tujuan dilakukannya kajian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengembangan Wisata Bahari Tlocor di Desa Kedungpandan.

Untuk memahami peran pemerintah desa dalam pengembangan Wisata Bahari Tlocor di Desa Kedungpandan, peneliti memanfaatkan indikator yang terdapat dalam teori pengembangan pariwisata yang diusulkan oleh Pitana dan Gayatri. Teori tersebut memaparkan bahwa terdapat tiga indikator peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata diantaranya, sebagai motivator, kedua sebagai fasilitator, yang terakhir sebagai dinamisator. Indikator [7]. pertama, motivator yang dimana pemerintah memiliki peran untuk memberikan dukungan kepada Masyarakat setempat. Kedua, pemerintah desa sebagai fasilitator, yang dimaksud fasilitator ialah sarana prasarana yang ada di tempat wisata alam. Ketiga, pemerintah memiliki peran sebagai dinamisator, Pemerintah memainkan peran penting dalam mengarahkan, melatih, mempromosikan masyarakat setempat dalam pengembangan kemampuan untuk membuat kerajinan dari sumber daya alam yang ada di wilayah mereka. Ini adalah bagian dari strategi untuk menciptakan ciri khas daerah yang dapat menarik perhatian wisatawan. Dengan bantuan pemerintah, masyarakat setempat dapat mengasah keahlian mereka dalam pembuatan buah tangan dan menghasilkan produk yang memiliki daya tarik dan nilai ekonomi yang tinggi. Hal ini dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang serta meningkatkan pariwisata dan ekonomi daerah secara keseluruhan.

II. METODE

Penelitian ini di Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu desa wisata yang terverifikasi di pesona Indonesia dengan tipe desa wisata mandiri. Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian kualitatif untuk melakukan analisis terhadap fenomena-fenomena yang ada di lapangan dengan cara yang sistematis dan ilmiah. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa gambaran atau ucapan serta tindakan individu yang menjadi objek penelitian [8]. Pada studi ini, metode pengumpulan data

yang diterapkan mencakup tiga teknik, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini juga memanfaatkan dua jenis sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung selama proses penelitian, seperti hasil interaksi wawancara antara peneliti dengan subjek studi. Sementara itu, data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui literatur jurnal penelitian sebelumnya dan media massa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif agar peneliti dapat menganalisis dan mendeskripsikan fenomena yang diperoleh pada saat penelitian, sehingga dapat ditarik kesimpulan pada sebuah penelitian. Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata Bahari Tlocor guna mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam pengembangan Wisata Bahari Tlocor di Desa Kedungpandan. Teknik penentuan sampel pada penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* guna pemilihan informan. Dalam studi ini yang jadi informan kunci yakni kepala Dusun Tlocor, kaur perancangan pedalaman Kedungpandan, kepala BUMDES, kasi pemerintahan bidang transportasi. Dalam studi ini, periset memanfaatkan bentuk kajian data Miles & Huberman pertama, pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kedua, pengumpulan data juga dapat dilakukan melalui reduksi data dengan menggolongkan serta menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil observasi. Ketiga, penyajian data yang mana model ini adalah proses mencocokkan hasil dari reduksi data dengan teori dan kajian penelitian terdahulu. Keempat, penarikan kesimpulan proses ini ialah proses akhir dari analisis data, penarikan kesimpulan merupakan hasil keseluruhan dari penyajian data sebelumnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan pemerintah desa dalam pengembangan wisata Bahari tlocor menjadi hal yang sangat penting. Seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah desa Kedungpandan yang menjadi tonggak penggerak pengembangan wisata tersebut. Wisata Bahari tlocor merupakan objek wisata yang berada di sepadan Sungai dusun tlocor yang dikelola oleh Masyarakat sekitar. Berdasarkan Hasil analisis data penelitian dengan melakukan wawancara, observasi, serta dokumentasi di lapangan peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata Bahari Tlocor di Desa Kedungpandan dapat dilihat menggunakan teori dari Pitana dan Gayatri yang menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) indikator peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata diantaranya, sebagai motivator, kedua sebagai fasilitator, yang terakhir sebagai dinamisator. [7]

1. Motivator

Peran pemerintah desa sebagai motivator dalam pengembangan pariwisata sangat diperlukan untuk mengembangkan pariwisata tersebut. Motivasi yang diberikan oleh pemerintah desa ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan wisata Bahari Tlocor. Pemerintah desa merupakan Lembaga pemerintahan yang memiliki kedudukan paling rendah, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mengelola potensi yang ada di wilayah kekuasaannya. Menurut Usman, Motivasi ialah dorongan yang dimiliki seseorang yang menjadi dasar untuk melakukan suatu Tindakan. [9]

Dalam pengembangan pariwisata, pemerintah desa memiliki peran penting sebagai penggerak yang memotivasi masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan Wisata Bahari Tlocor, yang terletak di dusun Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) bertindak sebagai pengelola wisata, sedangkan masyarakat dan pengusaha di sekitar objek wisata menjadi target utama yang perlu diberikan semangat agar pengembangan wisata tetap berjalan lancar. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada saat observasi di lapangan dengan melakukan wawancara kepada beberapa sampel, peneliti menemukan adanya motivasi yang diberikan oleh pemerintah Desa Kedungpandan dalam pengembangan Wisata Bahari Tlocor. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Akhmadi selaku kaur perencanaan desa Kedungpandan:

“Pemerintah desa merasa tidak kurang-kurang dalam memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mengembangkan wisata Bahari Tlocor. Hal ini terlihat dari berbagai cara yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan anggaran setiap tahunnya untuk pengembangan wisata Bahari Tlocor. Anggaran tersebut diserahkan kepada Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) yang bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan pengembangan wisata ini.” (wawancara dengan Bapak Akhmadi selaku kaur perencanaan desa Kedungpandan, Jumat 13 Oktober 2023).

Dalam wawancara dengan Bapak Akhmadi, selaku Kaur Perencanaan Desa Kedungpandan, pada Jumat 13 Oktober 2023, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sangat serius dalam mengembangkan wisata Bahari Tlocor. Mereka sadar akan potensi yang dimiliki oleh wisata Bahari Tlocor dan melihatnya sebagai salah satu

sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pernyataan ini didukung dari wawancara dengan Bapak Kasiono selaku Ketua Bumdes Mitra Abadi Desa Kedungpandan.

“tentunya pemerintah desa mendukung sepenuhnya pengembangan wisata Bahari Tlocor, terlebih lagi wisata ini sudah masuk ke segmen usaha dari Bumdes unit usaha wisata”. (wawancara dengan Bapak Kasiono selaku ketua Bumdes Mitra Abadi Kedungpandan Minggu 14 Oktober 2023).

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kasiono, terlihat bahwa Bumdes Mitra Abadi Kedungpandan memberikan peran yang cukup besar dalam pengembangan wisata Tlocor. Pengelolaan wisata yang berhasil tentunya akan meningkatkan income dari objek wisata Tlocor, sehingga pengembangan bisnis wisata di desa akan semakin pesat. Dalam hal ini, pemerintah desa Kedungpandan perlu terus memberikan dukungan dan motivasi kepada pelaku wisata untuk terus mengembangkan objek wisata Bahari Tlocor sehingga bisa menjadi destinasi wisata yang lebih menarik dan terkenal di masyarakat. Namun, dalam pengembangan wisata yang dilakukan oleh pemerintah desa tersebut, perlu ada perencanaan yang matang dan terukur agar pengembangan wisata berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu, diperlukan pengawasan yang ketat dalam menjaga kelestarian alam dan ekosistem di lokasi wisata, sehingga kerusakan lingkungan dapat ditekan seminimal mungkin.

Pemerintah desa Kedungpandan juga mempromosikan Wisata Bahari Tlocor dengan melakukan Kerjasama dengan berbagai komunitas dengan bentuk memberikan izin untuk komunitas mengadakan event di sekitar wilayah Bahari Tlocor, selain itu pemerintah Desa Kedungpandan juga menggunakan media sosial untuk media promosi. Melalui kerjasama dengan komunitas dan pengawasan yang ketat, Pemerintah Desa Kedungpandan berharap dapat menjaga keberlanjutan Wisata Bahari Tlocor dalam jangka Panjang. Adapun bentuk promosi yang dilakukan pemerintah desa dalam pengembangan Wisata Bahari Tlocor di Desa Kedungpandan ialah:

Gambar 1. Bentuk Promosi Wisata Bahari Tlocor



Sumber: diolah oleh penulis, (2023)

Promosi melalui media sosial, terutama melalui Instagram, telah menjadi salah satu strategi pemasaran yang efektif dalam menarik perhatian wisatawan. Pemerintah desa Kedungpandan telah menggunakan media sosial salah satunya Instagram sebagai media untuk pemerintah desa melakukan promosi dengan menampilkan panorama serta keindahan yang dimiliki Wisata Bahari Tlocor. Upaya ini dilakukan untuk menarik perhatian wisatawan yang ingin mengunjungi Wisata Bahari Tlocor. Selain promosi melalui Instagram, pemerintah desa juga menjalin kerjasama dengan komunitas lokal untuk mengadakan event di sekitar wilayah Bahari Tlocor. Melalui kerjasama ini, pemerintah desa memberikan izin kepada komunitas untuk mengadakan event yang berkaitan dengan kegiatan wisata di sekitar wisata Bahari Tlocor. Dalam meningkatkan efektivitas promosi ini, pemerintah desa juga dapat memanfaatkan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti pengelolaan akun Instagram yang profesional, influencer lokal, atau pihak media massa. Dengan memanfaatkan kolaborasi ini, promosi dapat mencapai jangkauan yang lebih luas dan lebih menarik perhatian para wisatawan. Hal itu dibuktikan dari hasil wawancara bersama Bapak Baidowi selaku Kepala Dusun Tlocor Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon.

“kami sering memberikan izin kepada komunitas untuk mengadakan event, Kunjungan-kunjungan ataupun acara yang menggunakan kawasan wisata Bahari Tlocor dengan mengundang OPD ataupun kedinasan lain sudah cukup sering dilakukan. Adanya kegiatan tersebut pemerintah desa berharap bisa menarik wisatawan untuk melakukan kunjungan di wisata Bahari Tlocor serta berharap wisata Bahari Tlocor semakin dikenal oleh Masyarakat luas”.

(wawancara dengan Bapak Baidowi selaku Kepala Dusun Tlocor Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon, Senin 2 Oktober 2023).

Fenomena yang terjadi dilapangan jika dihubungkan berdasarkan teori pengembangan wisata telah sesuai dengan pendapat Pitana dan Gayatri (2005) bahwa Pemerintah Desa Kedungpandan sebagai motivator pengembangan wisata bahari memiliki peran yang sangat penting dalam memotivasi masyarakat setempat untuk terlibat aktif dalam pengembangan wisata bahari, serta menjaga keberlanjutan wisata dan kelestarian lingkungan. Motivator menjadi faktor utama dalam pengembangan wisata karena peran pemerintah sebagai motivator dapat menjadi roda agar usaha wisata dapat terus berjalan. Salah satu bentuk motivasi yang diberikan oleh pemerintah Desa Kedungpandan adalah dengan memberikan pelatihan dan menyediakan tempat untuk Masyarakat berdagang. Selain itu, pemerintah desa Kedungpandan juga melakukan promosi wisata melalui media sosial.

2. Fasilitator

Dalam konteks ini, pemerintah desa memiliki peran sebagai fasilitator dalam menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung pengembangan potensi objek wisata yang terdapat di wilayahnya. Dalam undang-undang No. 10 tahun 2009 dijelaskan bahwa pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata memiliki peran untuk memberikan fasilitas, mengelola wisata, mengembangkan wisata, serta memberikan alokasi dana untuk peningkatan objek wisata. [2]

Fasilitator ialah seseorang atau pemerintah yang menjadi penanggungjawab dalam menyelesaikan suatu fenomena atau situasi yang ada di Masyarakat dengan menggunakan strategi khusus untuk mencapai tujuan. Tugas pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan terlaksananya pembangunan dengan memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang terlibat. [10]. Dalam hal ini, pemerintah desa memberikan fasilitas kepada Masyarakat untuk pengembangan wisata Bahari tlocor. Pertama, berupa sarana prasarana dapat dibuktikan dengan hasil wawancara oleh Bapak Baidowo selaku kepala Dusun Tlocor Kecamatan Jabon.

“pemerintah desa sudah memberikan fasilitas terkait sarana prasarana berupa perbaikan jalan menuju objek wisata seperti melakukan pavingisasi, selain itu pemerintah desa juga mendirikan Gedung Bumdes serta kios PKL untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat. Gedung Bumdes dibangun dengan tujuan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat desa. Bumdes atau Badan Usaha Milik Desa adalah sebuah bentuk usaha yang dikelola oleh masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian lokal”. (wawancara dengan Bapak Baidowi selaku kepala Dusun Tlocor Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon, Senin 2 Oktober 2023).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Baidowi, kepala Dusun Tlocor Kecamatan Jabon, dapat diketahui bahwa pemerintah desa telah memberikan berbagai fasilitas terkait sarana prasarana guna meningkatkan objek wisata dan perekonomian masyarakat setempat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan pavingisasi di jalan-jalan menuju objek wisata. Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Akhmadi selaku kaur perencanaan desa Kedungpandan.

“pemerintah desa sudah memberikan anggaran kepada bumdes, dimana bumdes berperan sebagai penanggungjawab dari pokdarwis serta usaha wisata ini. Bumdes mengalokasikan anggaran untuk mendirikan lapak bagi Masyarakat sekitar”. (wawancara dengan Bapak Akhmadi selaku kaur perencanaan Desa Kedungpandan, Jumat 13 Oktober 2023).

Pernyataan lain yang sepakat dengan pendapat diatas juga dipaparkan oleh Kasi Pemerintahan Transportasi Desa Kedungpandan yaitu Bapak Arifin.

“pemerintah desa mendirikan bangunan ruko untuk PKL, memperbaiki akses menuju objek wisata dengan menggunakan anggaran APBDes yang dikelola oleh Bumdes. Kami berharap, kedepannya pemerintah desa dapat menambahkan fasilitas yang dapat menarik minat Masyarakat”. (wawancara dengan Bapak Arifin selaku kasi pemerintahan bidang transportasi, Jumat 13 Oktober 2023).

Gambar 2. Pembangunan Ruko PKL



Sumber: diolah oleh penulis, (2023)

Saat ini, wisata Bahari Tlocor sedang melakukan Pembangunan lapak pedangan di sekitar wilayah Bahari Tlocor. Selain itu, peran Bumdes Mitra Abadi Kedungpandan dalam mengerjakan pembangunan lapak pedagang juga sangat signifikan. Bumdes ini bertindak sebagai mitra pemerintah desa dalam mengelola anggaran dan menjalankan proyek pembangunan di wilayah Kedungpandan. Dalam hal ini, Bumdes bekerja sama dengan pemerintah desa untuk memastikan bahwa pembangunan lapak pedagang dilakukan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pernyataan tersebut didapat dari hasil wawancara dengan Bapak Kasiono selaku Ketua Bumdes Mitra Abadi Kedungpandan.

“saat ini kami pihak bumdes sedang mengerjakan pembuatan lapak pedagang bagi Masyarakat sekitar tentunya menggunakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah desa Kedungpandan.”. (wawancara dengan Bapak Kasiono selaku Ketua Bumdes Mitra Abadi Kedungpandan, Sabtu 14 Oktober 2023).

Adanya pernyataan tersebut, pemerintah desa belum dapat menambah fasilitas yang dapat menarik minat wisatawan. Fokus utama pemerintah desa saat ini masih pada peningkatan ekonomi Masyarakat.

Tabel 2. Sarana dan Prasarana di Wisata Bahari Tlocor

Sarana dan Prasarana	Jumlah
Ruko PKL	15
Musholla	1
Toilet	5
Kantor	1
Area Parkir	1
Area tiket masuk	1
Perahu	7
Tulisan nama objek wisata (didekat objek wisata)	1

Sumber : Diolah oleh pemerintah Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon (2023)

Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat beberapa fasilitas yang tersedia di Wisata Bahari Tlocor, termasuk area parkir, toilet, kantor, ruko, ticketing, perahu, spot selfie. Fasilitas tersebut penting untuk memenuhi kebutuhan pengunjung, sehingga mereka dapat merasa nyaman selama berada di wisata tersebut. Selain itu, Pemerintah Desa Kedungpandan juga mendapatkan bantuan dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Sidoarjo.

Gambar 3. Fasilitas yang diberikan Dispora



Sumber: diolah oleh penulis, (2023)

Gambar 3 merupakan fasilitas yang diberikan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sidoarjo. Fasilitas tersebut diberikan untuk menambah kegiatan yang dapat dilakukan wisatawan saat berada di Wisata Bahari Tlocor. Akan tetapi, fasilitas tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi. Pernyataan tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku Kasi Pemerintahan bidang transportasi Desa Kedungpandan.

“dari pemerintah kabupaten sudah memberikan bantuan seperti speedboat itu dapat dari Dispora. Tetapi, sekarang speedboatnya tidak bisa digunakan lagi jadinya ya dibiarkan gitu aja. Sedangkan dari pemerintah desa sendiri juga belum mampu untuk memperbaiki speedboat itu karena minimnya anggaran yang kita miliki dan lagi masih banyak fasilitas di Wisata Bahari Tlocor ini yang masih minim”. (wawancara dengan Bapak Arifin selaku Kasi Pemerintahan bidang transportasi Desa Kedungpandan, Jumat 13 Oktober 2023).

Pemerintah Desa Kedungpandan juga mendapatkan bantuan dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dipsora) Kabupaten Sidoarjo

Dalam mengembangkan fasilitas dan sarana prasarana di Wisata Bahari Tlocor, ditemukan kendala yang signifikan yaitu minimnya anggaran yang dimiliki pemerintah desa. Faktor ini menjadi penghambat dalam pengembangan dan pemeliharaan fasilitas yang ada, serta pembangunan fasilitas baru yang dibutuhkan oleh pengunjung. Pernyataan ini didukung oleh wawancara dengan bapak Baidowi selaku kepala Dusun Tlocor Kecamatan Jabon.

“seharusnya suatu objek wisata memiliki ikon atau spot foto untuk menarik minat wisatawan, akan tetapi hingga saat ini wisata Bahari tlocor belum memiliki ikon ataupun spot foto yang menarik. Pemerintah desa merencanakan untuk membangun spot foto serta membuat area outbound untuk menarik wisatawan, tetapi hingga sekarang belum dapat teralisasi karena minimnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah.” (wawancara dengan Bapak Baidowi selaku Kepala Dusun Tlocor Kecamatan Jabon, Senin 2 Oktober 2023).

Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh Bapak Akhmadi selaku kaur perencanaan Desa Kedungpandan. Anggaran yang diperlukan untuk pengembangan wisata Bahari Tlocor sudah tersedia anggaran tersendiri yang diberikan oleh pemerintah desa dengan menggunakan APBDes kemudian diserahkan kepada Bumdes Mitra Abadi Kedungpandan. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3. Anggaran APBDes Kedungpandan untuk Pengembangan Wisata Bahari Tlocor

Tahun	Anggaran
2021	Rp. 50.000.000
2022	Rp. 50.000.000
2023	Rp. 45.000.000

Sumber: Diolah oleh Pemerintah Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon (2023)

Dari tabel diatas, dana tersebut akan digunakan dengan sebaik mungkin untuk mengelola wisata Bahari Tlocor. Dapat dilihat pada tahun 2021 dan 2022 pemerintah memberikan jumlah anggaran yang sama yakni sebanyak 50

Juta. Akan tetapi pada tahun ini, pemerintah hanya memberikan 45 juta, karena ada anggaran lain yang harus dikeluarkan oleh pemerintah desa. Menurut pemerintah desa, anggaran tersebut hanya cukup untuk memperbaiki sarana prasarana yang ada, jika untuk menambah fasilitas berupa spot foto sebagai ikonik ataupun mendirikan arena outbound anggaran yang dimiliki pemerintah masih belum mencukupi.

Ketiga, pemerintah desa belum bisa mengelola sepenuhnya wilayah yang ada di wisata Bahari Tlocor karena pemerintah desa belum memiliki surat izin kepemilikan wisata. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara oleh Bapak Baidowi selaku Kepala Dusun Tlocor Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon.

“area yang kami Kelola berada di sepadan Sungai sedangkan wilayah tersebut masih menjadi kewenangan dari BPWS, dari BPWS sendiri belum mau mengeluarkan surat izin kepemilikan wisata. Oleh karena itu, kami dan pokdarwis belum bisa mengakses seluruhnya wilayah yang ada di Wisata Bahari Tlocor.” (wawancara dengan Bapak Baidowi selaku Kepala Dusun Tlocor Desa Kedungpandan, Senin 2 Oktober 2023).

Selain itu, pernyataan mendukung terkait surat kepemilikan wisata Bahari Tlocor juga dikemukakan oleh Bapak Kasiono selaku Ketua Bumdes Mitra Abadi Kedungpandan.

“benar sampai saat ini, wisata Bahari Tlocor memang belum memiliki surat izin kepemilikan wisata. Kami dari pihak desa juga sudah melakukan berbagai Upaya. Akan tetapi, belum membuahkan hasil hingga saat ini karena lahan yang kita tempati itu adalah lahan balai besar Sungai” (wawancara dengan Bapak Kasiono selaku ketua Bumdes Mitra Abadi Kedungpandan, Sabtu 14 Oktober 2023).

Fenomena yang terjadi dilapangan jika dihubungkan dengan teori pengembangan wisata belum sesuai dengan teori yang dikemukakan Pitana dan Gayatri, dalam pengembangan suatu objek wisata, pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dengan mempermudah penyediaan infrastruktur yang diperlukan dalam objek wisata. Namun, dalam pengembangan Wisata Bahari Tlocor, peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pengembangan wisata dapat dikatakan belum berhasil karena pemerintah desa belum dapat memenuhi fasilitas yang dibutuhkan untuk aktivitas masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga sebaiknya memiliki hak milik secara resmi terkait objek wisata tersebut. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik kepemilikan objek wisata di masa depan. Idealnya suatu tempat wisata diwajibkan untuk memiliki surat izin kepemilikan wisata. Namun, dalam kasus Wisata Bahari Tlocor, pemerintah desa belum memiliki hak milik secara resmi terkait objek wisata tersebut. Hal ini dapat menghambat perkembangan Wisata Bahari Tlocor ke depannya. Minimnya anggaran yang dimiliki pemerintah desa juga menjadi faktor penghambat dalam pengembangan Wisata Bahari Tlocor. Pengembangan Wisata Bahari Tlocor membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas wisata, serta pengelolaan objek wisata itu sendiri. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah desa dapat mempengaruhi kualitas fasilitas yang disediakan, serta dapat mengurangi tingkat pengunjung yang datang ke objek wisata tersebut.

3. Dinamisator

Dalam prinsip *good governance* Pembangunan yang ideal ialah Pembangunan yang melibatkan pemerintah, pihak swasta, serta Masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah desa Kedungpandan berperan sebagai stakeholder dalam pengembangan Wisata Bahari Tlocor dengan tanggung jawab untuk mengoordinasikan kolaborasi yang baik antara sektor swasta dan Masyarakat. Sebagai dinamisator, pemerintah desa memiliki tugas untuk memobilisasi partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan sektor pariwisata dengan niat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah desa perlu menggalang partisipasi aktif masyarakat dalam tahap pembangunan sektor pariwisata. Partisipasi masyarakat sangat penting karena mereka adalah pihak yang akan merasakan dampak langsung dari pengembangan wisata tersebut. Dalam hal ini, pemerintah desa dapat menyelenggarakan pertemuan dan diskusi kelompok terarah guna melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan wisata. Hal tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah desa, dapat dibuktikan dari hasil wawancara oleh Bapak Arifin selaku kasi pemerintahan bidang transportasi Desa Kedungpandan.

“setiap satu bulan sekali pemerintah desa melakukan evaluasi pengembangan wisata Bahari Tlocor, dihadiri oleh pihak Bumdes, pengelola wisata, dan pemerintah desa. Disana kita menyampaikan aspirasi terkait apa saja yang kurang dalam pengembangan wisata Bahari tlocor kemudian mencari penyelesaiannya”. (wawancara dengan Bapak Arifin selaku kasi pemerintahan bidang transportasi Desa Kedungpandan, Jumat 13 Oktober 2023).

Gambar 4. Pelatihan Pembuatan Buah Tangan



Sumber: Indonesian Journal of Cultural and Community Development, (2023)

Gambar 4 merupakan salah satu contoh pelatihan yang diselenggarakan oleh perwakilan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang berlangsung di Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon. Menurut pendapat Pitana dan Gayatri (2005) pemerintah sebagai dinamisator memiliki peran untuk memberikan bimbingan, pelatihan promosi serta pengarahan untuk mengelola potensi sumber daya yang ada di wilayahnya. Pemerintah Desa Kedungpandan telah memberikan pelatihan untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya. hal tersebut dapat dibuktikan oleh hasil wawancara bersama Bapak Kasiono selaku Ketua Bumdes Mitra Abadi Kedungpandan.

“sudah lama kegiatan pemberdayaan ataupun pelatihan itu dilakukan, mulai Covid-19 kemarin otomatis semua kegiatan ke Masyarakat dan pokdarwis berhenti total. Akan tetapi, mulai tahun ini sudah mulai berjalan Kembali”. (wawancara Bapak Kasiono selaku Ketua Bumdes Mitra Abadi Kedungpandan, Sabtu 14 Oktober 2023).

Pernyataan lain yang sepakat dengan pendapat diatas juga dipaparkan oleh Kasi Pemerintahan Transportasi Desa Kedungpandan yaitu Bapak Arifin.

“kalau untuk pelatihan sudah sering diberikan tapi dominan yang mengikuti pelatihan pengurus inti dari pengelola wisata itu sendiri bukan untuk Masyarakat luas. Biasanya pelatihan diadakan pemerintah desa dan bekerja sama dengan mahasiswa yang sedang melakukan program pemberdayaan Masyarakat. Baru-baru ini juga dilakukan bimbingan teknis di luar kota yang diadakan oleh pihak Bumdes.” (wawancara Bapak Arifin selaku Kasi Pemerintahan bidang Transportasi Desa Kedungpandan, Jumat 13 Oktober 2023).

Berdasarkan dua pernyataan di atas, pemerintah desa Kedungpandan sudah memberikan bimbingan teknis atau pelatihan kepada pengelola wisata. Akan tetapi, seharusnya pelatihan diberikan kepada seluruh Masyarakat di Desa Kedungpandan agar Masyarakat bisa mengasah kemampuan dalam mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya.

Fenomena yang terjadi dilapangan jika dihubungkan dengan teori pengembangan wisata belum sesuai dengan teori yang dikemukakan Pitana dan Gayatri, bahwa pemerintah desa berperan dalam mengarahkan serta melatih masyarakat setempat dalam mengembangkan kemampuan mereka dalam membuat kerajinan dari sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Namun, dalam pengembangan wisata Bahari Tlocor, peran pemerintah desa sebagai dinamisator belum sepenuhnya berhasil. Salah satu kendala utama yang muncul adalah pemerintah desa belum memberikan peluang, modal, serta tempat pemasaran hasil kerajinan tangan dari masyarakat setempat. Hal ini menjadi suatu fenomena yang menarik untuk dibahas, terutama jika dilihat dari perspektif teori pengembangan wisata yang disajikan oleh Pitana dan Gayatri . Fenomena ini menunjukkan adanya keterbatasan pemerintah dalam mengoptimalkan potensi wisata Bahari Tlocor, terutama dalam hal mendukung pengembangan kerajinan tangan lokal. pemerintah desa perlu meningkatkan peran mereka dalam mendukung pengembangan kerajinan tangan lokal di wisata Bahari Tlocor. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah meningkatkan alokasi anggaran untuk pelatihan keterampilan dan penyediaan modal secara adil kepada masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah desa perlu bekerja sama dengan pihak terkait untuk mencari solusi dalam menyediakan tempat pemasaran atau promosi yang lebih baik. Dengan adanya peran pemerintah desa yang lebih aktif dan efektif dalam pengembangan wisata Bahari Tlocor, diharapkan potensi kerajinan tangan lokal dapat dioptimalkan. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah desa dalam hal peluang, modal, dan pemasaran akan membantu masyarakat setempat dalam mengembangkan keterampilan mereka, meningkatkan penghasilan, dan mempromosikan objek wisata Bahari Tlocor sebagai destinasi yang menarik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait peran pemerintah desa dalam pengembangan Wisata Bahari Tlocor di Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah Desa Kedungpandan sebagai motivator pengembangan wisata bahari memiliki peran yang sangat penting dalam memotivasi masyarakat setempat untuk terlibat aktif dalam pengembangan wisata bahari, serta menjaga keberlanjutan wisata dan kelestarian lingkungan. Peran pemerintah desa sebagai motivator sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan teori pengembangan pariwisata yang dikemukakan oleh Pitana dan Gayatri (2005).

Kedua, peran pemerintah desa sebagai fasilitator menurut teori pengembangan pariwisata Pitana dan Gayatri (2005) dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Minimnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah desa Kedungpandan menjadi salah satu faktor penghambat untuk pengembangan wisata Bahari Tlocor, karena pemerintah desa tidak dapat memenuhi fasilitas yang dibutuhkan untuk aktivitas pengunjung contohnya, arena outbound, spot foto, dll. Selain itu, pemerintah desa juga belum memiliki hak milik secara resmi terkait objek wisata tersebut. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik kepemilikan objek wisata di masa depan.

Ketiga, peran pemerintah desa sebagai dinamisor, pemerintah desa bertugas untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wisata dengan tujuan peningkatan perekonomian. Menurut Pitana dan Gayatri (2005) dalam indikator ini Pemerintah memainkan peran penting dalam mengarahkan, melatih, mempromosikan masyarakat setempat dalam pengembangan kemampuan untuk membuat kerajinan dari sumber daya alam yang ada di wilayah mereka. Maka dapat dikatakan belum berhasil karena pemerintah desa belum dapat mengotimalkan secara penuh potensi yang dimiliki di Desa Kedungpandan. Selain itu, pemerintah desa Kedungpandan memberikan peluang, modal, serta tempat pemasaran hasil kerajinan tangan dari masyarakat setempat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan rasa Syukur dan penghormatan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya yang telah memungkinkan saya menyelesaikan jurnal dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Wisata Bahari Tlocor di Desa Kedungpandan”. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan untuk meraih gelar sarjana Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya menyadari sepenuhnya bahwa pencapaian ini tidak akan berhasil tanpa dukungan serta bantuan dari banyak pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hidayatullah, M., Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Ibu Ilmi Usrotin Choiriyah, M., AP selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Bapak Hendra Sukmana, S., AP. M., KP selaku pembimbing, dan semua dosen yang mengajar mata kuliah program studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala desa dan perangkat desa Kedungpandan yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian terkait topik yang telah saya teliti. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua saya, Bapak Enggo Setyono dan Ibu Umi Susanti atas doa serta dukungan yang tiada henti. Terima kasih juga kepada saudara saya, Lisa Dwi Hapsari dan Muhammad Bilal Nur Hidayah, kekasih saya yang telah menemani saya untuk melakukan penelitian di Wisata Bahari Tlocor serta memberikan dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir saya. Terakhir, rasa terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman saya khususnya teman semasa saya SMA, serta mahasiswa Administrasi Publik Angkatan 2020 kelas A1 yang telah melalui perjuangan bersama untuk menyelesaikan tugas akhir. Semoga ucapan terima kasih ini dapat mencerminkan rasa hormat serta apresiasi kepada semua pihak yang telah turut serta dalam pencapaian saya menyelesaikan tugas akhir ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Iswanti, “Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir,” ... : *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, pp. 92-103, 2022.
- [2] G. d. Sumarno, “Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan,” *ANALISIS PENGARUH BOOKVALUE PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN DI BURSA EFEK JAKARTA (STUDI KASUS PERUSAHAAN KELOMPOK LQ-45)* Oleh, pp. 1-8, 2009.
- [3] F. S. Yelvita, “Peraturan Daerah Jawa Timur No. 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata,” *γ787*, pp. 2003-2005, 2022.
- [4] A. A. Ababil, “Peran BUMDes dalam Mengelola Desa Wisata Bukit Keki sebagai Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa,” *Jurnal Ilmiah Aset*, pp. 97-112, 2022.
- [5] H. A. Agustina, “TATA KELOLA PENGEMBANGAN OBJEK WISATA BAHARI TLOCOR DALAM MENARIK WISTAWAN DOMESTIK (Studi Kasus Wisata Bahari Tlocor Dusun Tlocor Desa Kedungpandan

- Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo),” *Jurnal Respon Publik*, pp. 9-11, 2021.
- [6] R. Medi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Buntu Burake di Kabupaten Tana Toraja,” *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, pp. 1-12, 2018.
- [7] D. Zizwatin Ainia, “Peran Pemerintah Desa Sekapuk Dalam Pengembangan Objek Wisata Bukit Setigi Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik,” *Jurnal Respon Publik*, pp. 57-63, 2021.
- [8] L. Moleong, “Metode Penelitian Kualitatif,” *Metodologi Penelitian Kualitatif*, pp. 1-9, 2017.
- [9] R. Nugrahaeni, “Motivasi Karyawan,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, pp. 1689-1699, 2015.
- [10] F. P. Tui, “Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kawasan Pesisir Kabupaten Bone Bolango,” *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, pp. 332-342, 2023.
- [11] D. Islamiyah Rakhmah, “Strategi Pengembangan Objek Wisata Pulau Lusi Di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo,” *Swara Bhumi*, pp. 77-85, 2019.
- [12] L. Khikmawati, “Model Pengembangan Wisata Bahari Dalam Meningkatkan Minat Kunjungan Wisatawan Model Development Marine Tourism in Increasing the Interest of Tourist Visits,” *Jurnal Kebijakan Publik*, pp. 413-420, 2022.
- [13] D. Kusumo, “Enhancing Seaweed-Based Dodol Production in Coastal Communities: A Case Study of *Gracillaria verrucosa* in Wisata Bahari Tlocor, Indonesia,” *Indonesian Journal of Innovation Studies*, pp. 1-12, 2023.
- [14] P. Manajemen, “Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pasca Covid Melalui Ekowisata Bahari di Kabupaten Sidoarjo,” pp. 112-124, 2023.
- [15] A. Murdyastuti, “Peran Pemerintah Desa Dalam Perubahan Pariwisata Osing Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi,” *Journal of Tourism and Creativity*, p. 117, 2020.
- [16] N. Nikodimus, “Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Ekowisata Danau Jemelak,” *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, pp. 67-75, 2020.
- [17] Y. Novitasari, “The Role of Pokdarwis in Product Development of Lusi Island Tourism Objects,” *Indonesian Journal of Public Policy Review*, pp. 1-6, 2022.
- [18] M. Y. Syaifudin, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo),” *Publika*, pp. 365-380, 2022.
- [19] U. Umarella, “Peran Pemerintah Negeri Nusaniwe, Kota Ambon dalam Pengembangan Obyek Wisata Paralayang di Bukit Ruhatu,” *Jurnal Masohi*, p. 82, 2022.
- [20] A. Wicaksana, “Tinjauan Pustaka,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., pp. 10-27, 2018.
- [21] F. S. Yelvita, “Bab 2 metode penelitian,” *γ787*, pp. 2003-2005, 2022.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.